Analisis Perbandingan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum dan sesudah UU No. 7 Tahun 2021

Gadis Pramudita¹

Fakultas Hukum dan Bisnis,
Universitas Duta Bangsa Surakarta
210416008@mhs.udb.ac.id

Antin Okfitasari²

2 Fakultas Hukum dan Bisnis,
Universitas Duta Bangsa Surakarta
Antin_okfitasari@udb.ac.id

Abstrak– Penelitian ini menganalisis perbandingan Pajak Penghasilan sebelum dan sesudah Undang-Undang No.7 Tahun 2021 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik analisis data dengan cara menggambarkan dan menganalisis berdasarkan teori yang ada dan sesuai dengan kenyataan yang terjadi dilapangan dengan menggunakan ilustrasi perhitungan yaitu membandingkan berdasarkan peraturan lama dengan UU PPh, PP No. 23/2018 dan UU HPP . Hasil analisis ilustrasi perhitungan bahwa untuk wajib pajak orang pribadi (sebagai karyawan) dengan penghasilan sampai dengan Rp60 juta beban pajak yang dibayar lebih rendah dengan UU HPP dibanding UU PPh karena hanya terkena lapisan tarif pertama. Penghasilan >Rp60 juta – Rp5 milyar, beban pajak lebih rendah dengan UU HPP dibanding UU PPh. Tetapi penghasilan diatas Rp 5 Miliar, Pajak yang dibayar lebih tinggi dengan UU HPP dibanding UU PPh. Pemberian Batasan peredaran bruto <Rp500 juta setahun tarif pajak 0%, maka UMKM yang terkena pajak adalah yang peredaran bruto >Rp500 juta setahun sehingga beban pajak UMKM lebih rendah. Adanya breaket tarif progresif memberi rasa keadilan pajak yaitu pajak dibebankan kepada wajib pajak sesuai dengan kemampuan membayar. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dikenakan. Implikasi penelitian lebih lanjut yaitu dengan menganalisis regulasi perubahan peraturan perundangan perpajakan yang menjadi poin utama dalam UU HPP.
Kata kunci : Pajak Penghasilan, UMKM, UU No.7 Tahun 2021 (UU HPP)

Abstract–This study analyzes the comparison of Income Tax before and after Law No. 7 of 2021 for Individual Taxpayers (WPOP). This research was conducted using a qualitative descriptive method. The data analysis technique is by describing and analyzing based on existing theory and in accordance with the reality that occurs in the field by using calculation illustrations, namely comparing the old regulations with the PPh Law, PP No. 23/2018 and the HPP Law. The results of the analysis illustrate the calculation that for individual taxpayers (as employees) with income of up to Rp. 60 million, the tax burden paid is lower under the HPP Law than the PPh Law because it is only exposed to the first layer of tariffs. Income >Rp60 million – Rp5 billion, the tax burden is lower under the HPP Law than the PPh Law. But income above IDR 5 billion, the tax paid is higher under the HPP Law than the PPh Law. Limitation on gross turnover of <Rp 500 million a year with a tax rate of 0%, then MSMEs who are subject to tax are those with gross turnover > Rp 500 million a year so that the MSME tax burden is lower. The existence of a progressive rate breaket gives a sense of tax justice, namely taxes are charged to taxpayers according to their ability to pay. The higher the income, the higher the tax imposed. The implication of further research is to analyze the regulation of changes in tax laws which are the main points in the HPP Law.

Keywords : Income Tax, MSMEs, Law Number 7 of 2021 (UU HPP)

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian negara dalam hal pembiayaan pembangunan adalah menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri

berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa salah satu fungsi pajak adalah untuk anggaran yaitu pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran

negara. Pengeluaran yang cukup besar terutama untuk belanja negara, porsi terbesarnya adalah belanja pegawai, belanja untuk Pendidikan, pembangunan infrastruktur serta transfer ke daerah dan dana desa.

Untuk mencapai target penerimaan negara tersebut maka pemerintah (Direktorat Jendral Pajak) berupaya untuk menerbitkan peraturan perpajakan yang dapat mengarahkan pada pencapaian target tersebut. Upaya-upaya tersebut dapat berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan. Intensifikasi pajak dapat berupa peningkatan jumlah Wajib Pajak (WP) maupun peningkatan penerimaan pajak itu sendiri. Upaya ekstensifikasi dapat berupa perluasan objek pajak yang selama ini belum tergarap. Disisi yang lain, untuk mengejar penerimaan pajak, perlu didukung situasi sosial ekonomi politik yang stabil, sehingga masyarakat diharapkan dapat dengan sukarela membayar pajaknya. Pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan kebijakan perpajakan yang dapat menarik minat masyarakat menjadi wajib pajak, berbagai kebijakan pun diberlakukan seperti sunset policy, tax amnesty atau pengampunan pajak (jilid I tahun 2015), tax amnesty jilid II tahun 2022 atau Pengungkapan Sukarela (PPS) dan pemberian insentif lain sebagaimana tertuang dalam PP No.46/2013, PP No. 23/2018. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan subyek pajak maupun obyek pajak. Subyek pajak dapat berupa kembalinya dana-dana yang berada di luar negeri, sedangkan dari sisi obyek pajak berupa penambahan jumlah wajib pajak.

Namun demikian dalam implementasi kebijakan tersebut, awalnya menimbulkan pro dan kontra, sebagaimana saat berlakunya PP No. 46/2013 yang akhirnya setelah berjalan 5 (lima) tahun pada tanggal 8 Juli 2018 pemerintah merevisi dengan mengeluarkan kebijakan baru yaitu PP No. 23/2018 dan resmi mengganti dan mencabut PP No.46/2013. PP No.23/2018 ini menekankan pada penurunan tarif pajak yang sebelumnya 1% menjadi 0,5% dari pendapatan bruto. Setelah 3 (tiga) tahun berlalu pada tanggal 29 Oktober 2021 pemerintah mengeluarkan UU Nomor 7

Tahun 2021 (disebut UU HPP). UU HPP terdiri dari enam ruang lingkup pengaturan, meliputi ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), program pengungkapan sukarela (PPS), pajak karbon, serta cukai. (Wachyu et al., 2020)

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini hanya mengambil topik kluster pajak penghasilan dengan subyek pajak orang pribadi, dengan tujuan menganalisis Pajak Penghasilan sebelum dan setelah pemberlakuan UU HPP. Apakah wajib pajak orang pribadi beban membayar pajaknya lebih tinggi atau lebih rendah sebelum atau setelah diberlakukan UU HPP.

Kajian Teori

Wajib pajak merupakan ketetapan aturan perundang-undangan perpajakan yang harus dilakukan oleh orang pribadi atau badan, yang untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemotongan atau pemungutan pajak tertentu. Yang dimaksud adil disini wajib pajak menghitung dengan sesuai peraturan perpajakan dan pemerintah juga melaksanakan semua ini sesuai kebutuhan guna untuk memperbaiki negara (Hartaroe et al., 2016).

DPR RI mengesahkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Peraturan ini bertujuan untuk memulihkan perekonomian negara karena dampak Covid-19 melalui optimalisasi penerimaan negara di bidang pajak. Secara umum, UU HPP mengubah dan menambah beberapa regulasi perpajakan berikut :

1. Mengubah UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)
2. Mengubah UU Pajak Penghasilan (UU PPh)
3. Mengubah UU Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN)
4. Menambah program pengungkapan sukarela Wajib Pajak
5. Menambah pajak karbon
6. Mengubah UU Cukai.

Implementasi UU HPP ini pun tidak serentak, terdapat beberapa penyesuaian dari masing-masing peraturan, berikut rincian

lengkapnya :

1. Pengaturan mengenai Pajak Penghasilan (PPh) berlaku tahun pajak 2022.
2. Pengaturan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berlaku mulai April 2022.
3. Pengaturan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) meliputi sanksi pajak dan integrasi NIK-NPWP berlaku sejak diundangkan.
4. Program pengungkapan sukarela berlaku mulai 1 Januari - 30 Juni 2022.
5. Pengenaan pajak karbon berlaku 1 April 2022 *piloting* PLTU Batu Bara.
6. Pengaturan UU Cukai berlaku sejak diundangkan.

Berikut tabel komparasi UU HPP dengan undang-undang yang berlaku sebelumnya di setiap peraturan.

1. Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi

Dalam konteks PPh, UU HPP merubah UU PPh yaitu UU No. 36 tahun 2008. PPh orang pribadi sendiri diatur dalam pasal 17 terkait perubahan tarif PPh dan penambahan lapisan (*bracket*) baru. Berikut komparasinya:

Lapisan Tarif	UU PPh	UU HPP
I	0 – Rp 50 juta dikenakan tarif 5%	0 – Rp 60 juta dikenakan tarif 5%
II	>Rp 50 – 250 juta dikenakan tarif 15%	>Rp 60 – 250 juta dikenakan tarif 15 %
III	>Rp 250 – 500 juta dikenakan tarif 25%	>Rp 250 – 500 juta dikenakan tarif 25%
IV	>Rp 500 juta dikenakan tarif 30%	.Rp 500 juta – 5 miliar dikenakan tarif 30%
V		>Rp 5 miliar dikenakan tarif 35%

2. Pajak Penghasilan (PPh) Natura

Dalam UU HPP, terdapat penambahan ayat mengenai pemberian natura

oleh pemberi kerja sebagai penghasilan pegawai yang tidak termasuk sebagai objek pajak. Sesuai pasal 4 ayat 1 (d) yang termasuk kedalam natura bukan objek pajak adalah :

- a. makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai
- b. natura dan/atau kenikmatan karena penugasan di suatu daerah
- c. natura dan/atau kenikmatan karena keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan, seperti seragam
- d. natura dan/atau kenikmatan yang dibiayai APBN/APBN
- e. natura dan/atau dengan jenis dan batasan tertentu.

3. Pajak Penghasilan (PPh) Pengusaha Perorangan dan Badan

UU HPP juga merubah peraturan PPh badan (diatur dalam pasal 17 ayat 1) dan menambah penguatan peraturan mengenai PPh UMKM (diatur dalam pasal 7 ayat 1 dan 2a) :

Wajib Pajak	UU PPh	UU HPP
Pengusaha Perorangan (UMKM)	Belum diatur (diatur dalam PP No. 23 Tahun 2018)	Perhitungan PPh final tarif 0,5% untuk omset maksimal Rp 500 juta tidak dikenai PPh
Badan	Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 28%	Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22%

4. Penghapusan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN), UU HPP merubah UU No. 42 tahun 2009. Penghapusan pembebasan PPN sendiri diatur dalam pasal 4A. Berikut komparasi komoditas yang dibebaskan PPN di UU KUP dan UU HPP :

Komoditas	UU KUP	UU HPP
Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya	Dibebaskan dari PPN	Dihapus
Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat	Dibebaskan dari PPN	Bebas terbatas

banyak		
Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya	Dibebaskan dari PPN	Dibebaskan dari PPN
Uang, emas batangan, dan surat berharga	Dibebaskan dari PPN	Dibebaskan dari PPN
Jasa pelayanan kesehatan medis	Dibebaskan dari PPN	Bebas terbatas
Jasa pelayanan sosial	Dibebaskan dari PPN	Bebas terbatas
Jasa pengiriman surat dengan perangko	Dibebaskan dari PPN	Dihapus
Jasa keuangan	Dibebaskan dari PPN	Bebas terbatas
Jasa asuransi	Dibebaskan dari PPN	Bebas terbatas
Jasa pendidikan	Dibebaskan dari PPN	Bebas terbatas
Jasa kesenian dan hiburan	Dibebaskan dari PPN	Dibebaskan dari PPN
Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan	Dibebaskan dari PPN	Dihapus
Jasa angkutan umum di darat dan air, serta udara dalam negeri	Dibebaskan dari PPN	Bebas terbatas
Jasa tenaga kerja	Dibebaskan dari PPN	Bebas terbatas
Jasa perhotelan	Dibebaskan dari PPN	Dibebaskan dari PPN
Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum	Dibebaskan dari PPN	Dibebaskan dari PPN
Jasa penyediaan tempat parkir	Dibebaskan dari PPN	Dibebaskan dari PPN
Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam	Dibebaskan dari PPN	Dihapus
Jasa pengiriman uang dengan wesel pos	Dibebaskan dari PPN	Dihapus
Jasa boga atau catering	Dibebaskan dari PPN	Dibebaskan dari PPN

5. Tarif PPN

UU HPP juga menaikkan tarif PPN yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 :

UU KUP	UU HPP
Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10%	Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu: a. sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022, b. sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

6. Sanksi Pajak

Dalam UU HPP terdapat perubahan 2 skema ketentuan sanksi dari UU KUP yaitu :

- a. sanksi pemeriksaan dan wajib pajak tidak menyampaikan SPT
- b. sanksi setelah upaya hukum namun keputusan keberatan atau pengadilan mengusulkan ketetapan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Tidak hanya itu, UU ini juga merubah besaran sanksi untuk kerugian negara.

Hal ini diatur dalam Bab II Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang merubah UU No. 16 tahun 2009. Berikut komparasi masing-masing jenis sanksi pelanggaran pajak :

a. Sanksi Pemeriksaan Wajib Pajak Tidak Menyampaikan SPT (Pasal 13)

Jenis Sanksi	UU KUP	UU HPP
PPH kurang dibayar	50 %	dikenakan bunga perbulan sebesar suku bunga acuan (yang berlaku dipasar) serta uplift factor 20%
PPH kurang dipotong	100 %	dikenakan bunga perbulan sebesar suku bunga acuan serta uplift factor 20%
PPH dipotong tapi tidak disetor	100 %	75%
PPN dan PnBM kurang dibayar	100 %	75%

b. Sanksi Setelah Upaya Hukum dengan Keputusan Menguatkan
Ketetapan Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 25)

Perbuatan	UU KUP	UU HPP
-----------	--------	--------

Keberatan	50%	30%
Mengajukan Banding	100%	60%
Peninjauan Kembali	100%	60%

c. Besaran Sanksi untuk Kerugian Negara

Uraian	UU KUP	UU HPP
Pidanapajak kealpaan	Membayar pajak + sanksi 3kali pajak kurang dibayar	Membayar pajak + sanksi 1 kali pajak kurang dibayar
Pidanapajak kesengajaan	Membayar pajak + sanksi 3kali pajak kurang dibayar	Membayar pajak + sanksi 1 kali pajak kurang dibayar
Pidanapajak pembuatan faktur pajak atau bupot PPh fiktif	Membayar pajak + sanksi 3kali pajak kurang dibayar	Membayar pajak + sanksi 1 kali pajak kurang dibayar

7. Pengungkapan sukarela

Pengungkapan sukarela atau yang sebelumnya memiliki istilah *tax amnesty* ditambahkan dalam satu klausul di Bab V UU HPP.

Sasaran pengungkapan sukarela ini adalah :

- a. Wajib pajak orang pribadi dan badan peserta *tax amnesty* 2016. Basis aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkap dalam *tax amnesty*.
- b. Wajib orang pribadi. Basisnya aset dari 2016 -2020 yang belum dilaporkan SPT 2020.

8. Pajak Karbon

Pajak karbon ini juga merupakan klausul baru di UU HPP diatur dalam Bab VI pasal 13. Subjek pajak karbon adalah orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon dan/atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon. Masa terutang pajak ditentukan dalam 3 hal

- a. Pada saat pembelian barang yang mengandung karbon
- b. Pada akhir periode tahun kalender aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu.
- c. Saat lain yang diatur dengan atau

berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Terkait tarif pajak karbon yang berlaku adalah Rp 30 (tiga puluh rupiah) per kilogram karbon dioksida.

9. Perubahan UU Cukai

UU HPP mengubah UU No. 39 tahun 2007 pasal 4 tentang Cukai. Peraturan cukai ini diatur dalam Bab VII pasal 14 UU HPP.

Pada dasarnya, UU ini menambahkan ketentuan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pidana di bidang cukai. Menggunakan prinsip *ultima remedium*, berikut perubahan peraturan yang berlaku :

Pelanggaran Administratif	UU Cukai	UU HPP
Saat Penelitian	Belum diatur	Membayar denda sanksi sebesar 3 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar
Saat Penyidikan	Membayar pajak + sanksi 4 kali nilai cukai kurang dibayar	Membayar sanksi denda sebesar 4 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar

10. Integrasi NIK dan NPWP

UU HPP Bab II Pasal 2 ayat 1 dan 2 mengatur mengenai implementasi integrasi NIK dan NPWP. Secara lebih spesifik, terkait teknis dan mekanisme implementasi diatur lebih dalam di Perpres 83/2021. Wajib pajak sendiri adalah mereka yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan. Sehingga, meskipun telah memiliki NIK, tidak semua masyarakat memiliki kewajiban untuk membayar pajak.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptif kualitatif. Teknik kualitatif adalah teknik analisis data dengan

cara menggambarkan dan menganalisis berdasarkan teori yang ada dan sesuai dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, Data dan informasi yang dibutuhkan dan diperoleh dari berbagai referensi literatur, jurnal-jurnal media cetak, dokumen arsip, dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan masalah tersebut yang dapat digunakan sebagai landasan teori. (Nafia & Sunandar, 2016) Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan ilustrasi perhitungan dengan membandingkan berdasarkan peraturan lama dengan UU PPh, PP No. 23/2018 dan UU HPP.

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

Berikut ini adalah ilustrasi perhitungan Pajak penghasilan dengan UU PPh dan UU HPP adalah sebagai berikut :

- a. Jika Wajib Pajak Orang Pribadi bernama Dita adalah karyawan dengan status belum menikah dan tidak ada tanggungan dengan penghasilan netto sebulan Rp 5 juta. Dengan contoh yang sama jika penghasilan netto sebulan Rp 10 juta, dan 15, maka dapat dihitung pada tabel berikut ini :

Tabel 1 Ilustrasi Perhitungan Pajak Penghasilan WPOP sebagai karyawan dengan UU PPh dan UU HPP

Penghasilan Netto/bulan	Rp5.000.000		Rp10.000.000		Rp15.000.000	
Penghasilan Netto/tahun	Rp 60.000.000		Rp 120.000.000		Rp 180.000.000	
PTKP (TK/0)	Rp 54.000.000		Rp54.000.000		Rp 54.000.000	
PKP	Rp. 6.000.000		Rp66.000.000		Rp 126.000.000	
	UU PPh	UU HPP	UU PPh	UU HPP	UU PPh	UU HPP
PPh Terutang	5% x 6 jt = Rp 300rb	5% x 6 jt = Rp 300rb	5%x50 jt = Rp2,5 jt 15%xRp16jt = Rp2,4 jt	5%x60 jt = Rp3 jt 15%xRp6 jt = Rp900rb	5%x50 jt = Rp2,5 jt 15% x 76jt = Rp11,4 jt	5%x60 jt = Rp3 jt 15% x Rp66jt = Rp9,9jt
Total PPh	Rp 300rb	Rp 300rb	Rp4,9 jt	Rp3,9 jt	Rp13,9 jt	Rp12,9 jt
Keterangan	PPh = HPP		PPh > HPP (selisih Rp 1 jt)		PPh < HPP (selisih Rp 1jt)	

Dengan demikian dari perhitungan tabel diatas bahwa :

- 1) Perubahan tarif ini tidak menambah beban PPh bagi orang pribadi yang berpenghasilan sampai dengan Rp 5 miliar setahun.
- 2) Masyarakat berpenghasilan sampai dengan Rp 4,5 miliar juta per bulan tetap tidak membayar PPh sama sekali.
- 3) Masyarakat dengan penghasilan diatas Rp 4,5 miliar per bulan mayoritas akan membayar pajak yang lebih rendah.

- b. Perhitungan Pajak Penghasilan bagi UMKM : Tuan Steven dalam tahun 2022 mempunyai omzet setiap bulannya Rp 100.000.000. Berapakah beban pajaknya untuk Tuan A sebelum dan sesudah pemberlakuan UU No.7/2021, berikut ini penjelasannya
Tabel 2 Ilustrasi Perhitungan Pajak Penghasilan WPOP sebagai UMKM dengan UU PPh dan UU HPP

Bulan	Omzet	Omzet Kumulatif	PTKP	PKP	PPhFinal terutang UU HPP	PPhFinal terutang UU PPh
Jan	100.000.000	100.000.000		0	0	500.000
Feb	100.000.000	200.000.000		0	0	500.000
Maret	100.000.000	300.000.000		0	0	500.000
April	100.000.000	400.000.000		0	0	500.000
Mei	100.000.000	500.000.000		0	0	500.000
Juni	100.000.000	600.000.000		100.000.000	500.000	500.000
Juli	100.000.000	700.000.000	500.000.000	100.000.000	500.000	500.000
Agustus	100.000.000	800.000.000		100.000.000	500.000	500.000
Sep	100.000.000	900.000.000		100.000.000	500.000	500.000
Oktober	100.000.000	1.000.000.000		100.000.000	500.000	500.000
Nov	100.000.000	1.100.000.000		100.000.000	500.000	500.000
Des	100.000.000	1.200.000.000		100.000.000	500.000	500.000
TOTAL	1.200.000.000			700.000.000	3.500.000	6.000.000
Sebelum berlakunya UU HPP pajak yang dibayar UMKM sebesar RP 6.000.000, setelah berlakunya UU HPP menjadi Rp3.500.000 sehingga terjadi selisih Rp 2.500.000 dengan demikian bagi para UMKM beban pajak yang dibayar menjadi berkurang.						

Berdasarkan table menjelaskan bahwa total peredaran bruto sampai dengan bulan mei 2022, omzet masih berada pada Rp500 juta, sehingga berdasarkan UU HPP dikenakan tarif (0%) sehingga tidak dikenai pajak, berbeda dengan sebelum ada UU HPP yaitu PP No.23/2018 dikenai pajak 0,5%. Ketika omzet lebih dari Rp500 juta yaitu mulai bulan Juni sampai Desember kumulatif >500juta akan dikenai pajak sebesar 5% dari omzet setiap bulannya. Dengan adanya UU HPP, para UMKM yang omzet dibawah Rp4,8 Milyar pajak yang dibayar berkurang yang semula Rp6 juta menjadi Rp3,5 juta. Dengan demikian UU HPP ini memberikan bukti bentuk kepedulian pemerintah terhadap wajib pajak orang pribadi baik sebagai kayawan maupun yang mempunyai usaha (UMKM) karena beban pajak yang harus dibayar Tuan A menjadi berkurang Rp2,5 juta.

3.2. Pembahasan

Dari penelitian tersebut bahwa UU HPP memberikan dampak positif bagi wajib pajak orang pribadi UMKM dengan memberikan tarif 0% jika peredaran bruto (omzet) <Rp500 juta, sehingga tidak dikenai pajak, dikenai pajak sebesar 5% dari omzet setiap bulannya ketika omzet >Rp500 juta,

hal ini berbeda dengan sebelum ada UU HPP yaitu PP No. 23/2018 dikenai pajak 0,5% dari omzet setiap bulannya. Peredaran bruto tidak kena pajak ini serupa dengan PTKP dalam perhitungan PKP wajib pajak orang pribadi.

Dari sisi masa pemberlakuan UU No.23/2018, jangka waktu untuk badan usahatahun2021 adalahtahunterakhirmendapat kaninsentifuntukmenggunakan pajak UMKM setelah berakhirnya insentif maka akan berlaku tarif normal, dengan demikian akan dikenakan tarif umum sesuai dengan UU PPh menggunakan Pasal 17 UU PPh, yang mengatur pengenaan pajak penghasilan berbasis penghasilan netto. Pengenaan pajak berdasarkan penghasilan netto dinilai lebih ideal untuk mengukur kemampuan membayar pajak, dibandingkan perhitungan berbasis penghasilan bruto.

Dasar pengenaan PPh berdasar penghasilan netto paling sesuai dengan azas *equality* dalam pemungutan pajak, yang mensyaratkan bahwa pajak harus bersifat adil dan merata, dalam artian pengenaannya harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*).

Namun demikian, ketentuan lain dalam PP No. 23/2018 pasal 3 ayat (2) ditegaskan bahwa wajib pajak yang telah memilih untuk dikenai PPh berdasarkan tarif

Pasal 17 UU PPh tidak lagi dapat memanfaatkan tarif 0,5%. Oleh karena itu, pemilihan pemanfaatan tarif 0,5% ini harus mempertimbangkan kemampuan finansial maupun kemampuan administrasi perpajakan. Jika sekiranya pengusaha merasa sudah mampu menjalankan administrasi perpajakan dengan baik, dalam hal ini menyelenggarakan pembukuan sesuai ketentuan yang berlaku, maka menggunakan tarif Pasal 17

UU PPh adalah pilihan yang terbaik. Penggunaan tarif 0,5% tidak dapat dinikmati selamanya karena PP 23 tahun 2018 memberikan batasan waktu kepada wajib pajak untuk memanfaatkan tarif 0,5% hanya selama tujuh tahun untuk wajib pajak orang pribadi, empat tahun untuk wajib pajak persekutuan komanditer, firma dan koperasi, dan tiga tahun untuk wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas. Setelah batas waktu yang ditentukan, wajib pajak diharuskan kembali ke metode penentuan PPh menggunakan tarif sesuai Pasal 17 UU PPh UU KUP. Dengan kata lain wajib pajak harus tetap berupaya untuk mempelajari bagaimana menjalankan administrasi perpajakan sesuai ketentuan yang lazim digunakan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis ilustrasi perhitungan bahwa untuk wajib pajak orang pribadi (sebagai karyawan) dengan penghasilan sampai dengan Rp60 juta beban pajak yang dibayar lebih rendah dengan UU HPP dibanding UU PPh karena hanya terkena lapisan tarif pertama. Penghasilan >Rp60 juta-Rp5 milyar, beban pajak lebih rendah dengan UU HPP dibanding UU PPh. Tetapi penghasilan diatas Rp 5 Miliar, Pajak yang dibayar lebih tinggi dengan UU HPP dibanding UU PPh.

Pemberian Batasan peredaran bruto <Rp500 juta setahun tarif pajak 0%, maka UMKM yang terkena pajak adalah yang peredaran bruto >Rp500 juta setahun. Sehingga beban pajak UMKM lebih rendah.

Adanya break tarif progresif menunjukan rasa keadilan pajak yaitu pajak dibebankan kepada wajib pajak sesuai dengan

kemampuan membayar. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dikenakan. Dengan kata lain wajib pajak harus tetap berupaya untuk mempelajari dan meningkatkan kemampuan bidang finansial maupun kemampuan administratif, dengan demikian dapat menjalankan administrasi perpajakan sesuai ketentuan yang lazim digunakan. (Kurnianingsih, 2022)

Saran

Mensosialisasikan tentang penerapan UU Nomor 7 tahun 2021 karena pemberlakuan UU ini dimulai tahun 2022. Sesudah diberlakukannya UU Nomor 7 tahun 2021 (UU HPP) ini harus ada evaluasi secara berkesinambungan sehingga penerapan UU HPP sesuai dengan prinsip keadilan, tidak memberatkan, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mengedukasi mengenai manfaat pajak bagi masyarakat dengan harapan masyarakat dapat membuat pembukuan atas usaha yang dijalankannya dengan harapan usaha dapat tumbuh dan berkembang lebih maju lagi. (Kurnianingsih, 2022)

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah Yang Maha Esa karena atas rahmat dan nikmatnya penulis dapat menyelesaikan artikel dengan sebaik-baiknya. Penulis menyadari banyak terdapat kekurangan di dalam penulisan artikel ini. Oleh karena itu, penulis meminta maaf jika terdapat salah kata dan mengharapkan saran dan kritik untuk menyempurnakan penulisan artikel kedepannya.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih dan semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

6. REFERENSI

- Hartaroe, B. P., Mardani, R. M., & Abs, M. K. (2016). *Prodi manajemen*. 82–94.
Kurnianingsih, R. (2022). Analisis Pajak Penghasilan sebelum dan setelah Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2021 bagi WP Orang Pribadi. *Journal Competency of Business*, 5(02), 112–129.
<https://doi.org/10.47200/jcob.v5i02.1097>

Nafia, D., & Sunandar. (2016). *Analisis Perbedaan Penerimaan Pajak Penghasilan Sebelum*.

Najiyullah, A. (2010). *PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT. HIKERTA PRATAMA (Studi Kasus Pada PT . Hikerta*

Pratama) Oleh : JAKARTA 1432 H / 2010 M. 110.

Hidayat, A. (2014). Analisis Dampak Perubahan Tarif Pajak Penghasilan di Indonesi.

Bppk,7(ANALISIS DAMPAK PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN DI INDONESIA), 3-5.

Wachyu, W., Winarto, A., Kunci, K., & Capital, I. (2020). *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*

Unsurya *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya. Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*

Unsurya, 5(1), 50–60.

<https://www.pajakku.com/read/61679de64c0e791c3760b892/Ayo-Simak-Perubahan-UU-KUP-dalam-UU-HPP->